PEMKOT BERHASIL PERTAHANKAN WTP 16 KALI BERTURUT-TURUT

Hasto Targetkan 100 Persen Rekomendasi Ditindaklanjuti

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya menorehkan prestasi dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hingga 16 kali berturut-turut. Meski demikian Walikota Yogya Hasto Wardoyo bertekad untuk mengejar seluruh rekomendasi mampu ditindaklanjuti hingga 100 persen.

Hasto menilai capaian WTP merupakan bentuk pengakuan atas LKPD yang telah disajikan sesuai dengan aturan perundangan. Hal tersebut menjadi capaian positif mengingat Kota Yogya merupakan peraih WTP terbanyak dibanding kabupaten lain di DIY. "Kami semua tentu juga mengapresiasi karena semua kabupaten dan kota di DIY ini mampu meraih WTP. Tetapi harus dipahami juga kalau opini ini belum menjamin 'fraud'," ungkapnya, Minggu (20/4).

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten dan kota di DIY digelar pada Kamis (17/4) lalu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY. Pada kesempatan itu Kota Yogya mampu meraih WTP hingga 16 kali, Kabupaten Sleman 14 kali, Bantul 13 kali, Kulonprogo 12 kali dan Gunungkidul 10 kali. Capaian WTP tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2024.

Hasto mengungkapkan seiring capaian WTP tersebut BPK RI Perwakilan DIY juga menorehkan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah. Batas waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi ialah 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

"Kalau kita lihat, sejak tahun 2005 jumlah rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti oleh Kota Yogya baru mencapai 93,14 persen. Memang sudah jauh di atas target nasional, tetapi di periode ini akan saya kejar 100 persen ditindaklanjuti. Ini untuk mewujudkan clean and clear government," ungkapnya.

Oleh karena itu, imbuh Hasto, guna menjamin pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, capaian WTP saja tidak cukup. Sehingga arahan dari BPK RI Perwakilan DIY sangat dibutuhkan supaya penyelenggaraan keuangan daerah dapat menjamin atau menutup celah pelanggaran. "Bagaimana kualitas ini yang harus ditingkatkan. Seringkali orang cerdas itu bisa kalah dengan kepentingan. Jangan sampai kita bekerja membawa-bawa kepentingan, kecuali kepentingan untuk melayani," urainya.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan DIY Agustin Suhartatik, menyampaikan opini WTP diberikan dengan mendasarkan beberapa kriteria. Di antaranya kepatuhan atas peraturan perundangan, efektivitas pengendalian internal serta pelaporan standar akuntansi. Meski demikian, pihaknya juga menegaskan jika opini WTP belum menjamin terbebas dari kecurangan atau fraud. Jika dalam prosesnya ditemukan kecurangan yang berdampak pada potensi kerugian negara maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

Selama pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2024, BPK RI Perwakilan DIY menaruh catatan pada berbagai aspek. Antara lain menyangkut penatausahaan piutang pajak daerah yang belum memadai, usaha reklame yang belum ditetapkan sebagai wajib pajak atau tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pengelolaan dana hibah dan bansos hingga menyangkut barang milik daerah.

"Tetapi harus kami akui bahwa penyelesaian rekomendasi oleh kabupaten dan kota di DIY ini tergolong cukup tinggi. Ini bentuk komitmen pemda dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah," katanya.

Menurutnya, target nasional atas tindaklanjut rekomendasi ialah 75 hingga 80 persen. Sedangkan seluruh kabupaten dan kota di DIY capaiannya di atas 90 persen. Kota Yogya mencapai 93,14 persen, Sleman 94,2 persen, Kulonprogo 96,76 persen, Bantul 94,42 persen dan Gunungkidul 99,14 persen. Pihaknya pun berharap seluruh rekomendasi yang diberikannya mampu ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

"Tentunya kami apresiasi atas komitmen lembaga dewan dan pemerintah daerah yang ada di DIY ini. Jika ada yang kurang jelas atas apa yang sudah kami rekomendasikan, DPRD bisa berkonsultasi dengan BPK sesuai diatur dalam MoU," tandasnya. **(Dhi)-f**

KR-Ardhi Wahdan

Hasto Wardoyo didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Yogya Sinarbiyat Nujanat, menerima laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Yogya 2024.

TURUT MENJADI ATENSI BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN RI

Penertiban Reklame Ilegal Harus Semakin Gencar

YOGYA (KR) - Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Yogya mendapat sambutan positif dari eksekutif. Terutama menyangkut penertiban reklame ilegal atau tak berijin yang kini harus semakin digencarkan. Ini lantaran maraknya reklame ilegal turut menjadi atensi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya Susanto Dwi Antoro, menyebut sejak awal pihaknya memberikan rekomendasi penertiban reklame melanggar salah satu tujuannya ialah mengamankan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. "Tidak pernah terbersit dalam pikiran kami bahwa penertiban reklame akan mengganggu iklim investasi. Justru investasi akan semakin sehat dan PAD dari pajak reklame bisa optimal. Dan akhirnya ini terbukti kan," tandasnya, Minggu (20/4).

Atensi yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan DIY tertuang dalam catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Dalam catatan tersebut salah satunya berkaitan dengan usaha reklame yang belum ditetapkan sebagai wajib pajak atau tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Reklame tidak berijin atau ilegal jelas merupakan bentuk pelanggaran serta sangat berpotensi tidak menyetorkan pajak. Padahal keberadaannya menjalankan usaha komersil.

Toro, sapaan akrabnya, menambahkan dalam pertemuan terakhir bersama tim eksekutif terdapat 335 titik reklame yang tersebar di berbagai sudut Kota Yogya. Dari jumlah itu ada 51 reklame melanggar yang dalam tahap penertiban. Akan tetapi perlu dicermati kembali terkait jumlah reklame secara faktual. "Fokus kami lebih pada aspek penertiban sesuai peraturan perundangan. Mengingat hampir setiap sudut di Kota Yogya ini memiliki nilai strategis, maka harus dilihat lagi jangan sampai ada yang terselip," tandasnya.

Di samping itu, 335 titik reklame tersebut merupakan iklan luar ruang yang berdimensi sedang hingga besar. Sedangkan reklame berukuran kecil atau 1x1,5 meter yang sifatnya ilegal ditengarai juga cukup banyak. Reklame itu biasanya berkedok iklan layanan masyarakat namun menyediakan ruang untuk promosi komersil. Tidak sedikit yang mencantumkan logo aparat penegak hukum padahal dimiliki oleh swasta. "Milik siapapun sepanjang itu melanggar wajib untuk ditertibkan. Kami tidak pandang bulu dan kami siap mendampingi Sat Pol PP kapan pun," tegas Toro.

Sementara Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, mengungkapkan dukungan dari lembaga dewan menjadi pemacu semangat untuk menertibkan semua reklame melanggar. Sedikitnya sudah ada 14 titik reklame yang berhasil dibongkar baik secara paksa maupun mandiri oleh pemiliknya. Sedangkan sisanya masih dalam tahapan penertiban serta menunggu tempo untuk pembongkaran. Terutama reklame yang sudah jelas-jelas tidak akan mendapatkan ijin karena berdiri di area larangan.

Octo juga sepakat pembongkaran reklame ilegal seharusnya bersifat lex specialis atau tanpa menunggu tahapan penertiban. Pasalnya dari aspek regulasi reklame tersebut sudah pasti tidak akan mendapatkan ijin sehingga sudah harus dibongkar. Apalagi sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi A DPRD Kota Yogya sebagai lembaga mitra penyelenggara pemerintahan. "Tahapannya harus menunggu sekian batas waktu. Itu cukup lama. Sehingga kami perlu mendapatkan kajian hukum kalau reklame yang demikian itu tanpa menunggu tahapan. Artinya langsung bisa kami tertibkan karena ijin juga pasti tidak akan turun," ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan tidak pernah tebang pilih dalam melakukan aksi penertiban. Beberapa reklame milik instansi pemerintah bahkan juga turut ia tertibkan dengan cara pembongkaran. Salah satunya reklame milik Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya berupa iklan layanan masyarakat. Lokasinya banyak terdapat di persimpangan jalan dan ijinnya sudah kadaluarsa. **(Dhi)-f**

IPM Kota Yogya Masih yang Tertinggi

YOGYA (KR) - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Yogya sepanjang tahun 2024 masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut menyimpan tantangan lantaran gini rasio atau ketimpangan ekonomi di masyarakat juga masih cukup renggang.

Walikota Yogya Hasto Wardoyo, mengungkapkan ketimpangan pendapatan atau gini ratio di Kota Yogya berada pada angka 0,449 persen di tahun 2024. Angka tersebut sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,454 persen. "Ini tantangan di tengah IPM Kota Yogya yang tertinggi nasional. Bagaimana ekonomi kerakyatan harus terus kita dorong. Ekonomi kita harus ditopang oleh rakyat, bukan hanya dikuasai oleh segelintir pihak. Contohnya melalui koperasi, nanti kita akan optimalkan untuk menggerakkan ekonomi berbasis kebersamaan, di mana manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang," paparnya, Jumat (18/4).

Oleh karena itu dirinya berharap banyaknya sumber daya manusia di Kota Yogya harus mampu menekan gini rasio yang selama ini terjadi. Setidaknya tidak hanya orang kaya yang semakin kaya melainkan orang miskin pun semakin sejahtera. Kebijakan pembangunan ekonomi yang akan dibangun pun harus bermuara pada pemerataan. Hal ini supaya peningkatan ekonomi tidak hanya diasakan oleh segelintir orang.

Terkait dengan IPM tahun 2024, Hasto menjelaskan Kota Yogya menunjukkan peringkat pertama nasional dengan angka 89,1 persen. Naik 0,55 persen dibandingkan dengan tahun 2023 pada angka 88,61 persen. Sementara rata-rata IPM nasional berada di angka 79,02 persen. "Ini menjadi satu hal baik yang harus kita tingkatkan dengan tantangan ke depan yang juga tidak mudah. IPM ataupun Human Development Index (HDI) di tahun ini akan bergeser menjadi Human Capital Index (HCI) atau Indeks Modal Manusia, dengan fokus yang lebih luas pada modal manusia dan potensi sumber daya manusia," terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogya Budi Santoso Asrori, mengatakan IPM dinilai dari tiga aspek yakni usia harapan hidup, rata-rata lama dan harapan sekolah serta aspek pengeluaran perkapita. Untuk rata-rata lama sekolah di Kota Yogya tercatat mencapai 12,11 tahun dan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sementara untuk harapan lama sekolah yang menunjukkan proyeksi waktu seseorang mengenyam pendidikan di Kota Yogya mencapai 17,62 tahun. **(Dhi)-f**

Walikota Menyapa Umat pada Ekaristi Vigili Paskah

YOGYA (KR) - Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo didampingi Wakil Walikota Wawan Harmawan dan Forkopimda Kota Yogyakarta menyapa ribuan umat dan menyampaikan ucapan pada perayaan Ekaristi Vigili Paskah di Gereja Santo Antonius Padua, Kotabaru Yogyakarta, Sabtu (19/4).

Romo Kepala Paroki Santo Antonius Padua Kotabaru, Rm Nikolaus Devianto Fajar SJ mengucapkan selamat datang kepada rombongan Walikota Yogyakarta. Menurutnya, perayaan Ekaristi Vigili Paskah di Gereja Katolik Santo Antonius Padua Kotabaru digelar tiga kali, sore hingga malam hari. "Ini menjadi hari yang penting bagi kami. Karena disinilah kami yang bersama-sama Yesus yang mengalami sengsara wafat, berjaga-jaga untuk menantikan kebangkitannya," katanya.

Hasto Wardoyo mengucapkan selamat merayakan Trihari Suci Paskah tahun 2025, semoga memberikan berkah dan anugerah serta semakin menguatkan gotong royong masyarakat Kota Yogyakarta. "Kita tidak membeda-bedakan suku, ras dan agama. Oleh karena itu toleransi yang dikembangkan di Kota Yogyakarta harus dijunjung bersama-sama," katanya.

Walikota menyampaikan apresiasinya terhadap kekhusyukan umat dalam mengikuti perayaan, khususnya pada Malam Paskah. "Pemerintah Kota Yogyakarta sangat mengapresiasi kekhusyukan umat. Saya melihat jemaat yang hadir luar biasa banyak, bahkan hingga memenuhi area jalanan di sekitar gereja," ujar Hasto.

Menurutnya, toleransi antar umat beragama di kawasan Kotabaru yang dikenal sebagai kawasan cagar budaya sangatlah damai.

"Kota Baru ini kawasan heritage yang dikelilingi oleh dua gereja dan masjid. Saya kira ini sangat merepresentasikan bahwa Yogyakarta adalah kota yang sangat menjunjung tinggi toleransi," katanya. **(Dev)-f**

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
ARTHA SUMBER ARUM

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
ARTHA SUMBER ARUM
Jl. Laksda Adisucipto No.31 Yogyakarta Telp. (0274) 489083 (Hunting) Fax (0274) 489160

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
POSISI LAPORAN 31 DESEMBER 2024

Laporan Posisi Keuangan

(Dalam Satuan Rupiah)

ASET	Des 2024	Des 2023
Kas dalam Rupiah	19.869	109.246
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penempatan pada Bank Lain	12.024.482	9.535.089
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	175	0
Jumlah	12.024.307	9.535.089
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank – pihak terkait	82.669	71.101
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait	29.043.350	28.708.657
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	209.136	192.559
Penyertaan Modal		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Jumlah	28.916.883	28.587.199
Agunan yang Diambil Alih	125.000	400.000
Properti Terbengkalai		
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan Bangunan	0	0
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	0	0
c. Inventaris	1.170.965	1.288.534
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	521.768	594.129
Aset Tidak Berwujud	80.383	80.383
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	80.383	80.383
Aset Lainnya	1.580.757	1.923.537
Total Aset	43.316.013	41.249.476

(Dalam Satuan Rupiah)

LIABILITAS	Des 2024	Des 2023
Liabilitas Segera	150.356	117.933
Simpanan		
a. Tabungan	3.698.375	4.337.208
b. Deposito	29.208.262	27.179.536
Simpanan dari Bank Lain	2.200.000	2.450.000
Pinjaman yang Diterima	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Lainnya	400.157	464.440
Total Liabilitas	35.657.150	34.549.117

(Dalam Satuan Rupiah)

EKUITAS	Des 2024	Des 2023
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	4.000.000	4.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	3.000.000	3.000.000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	200.000	200.000
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Tahun-tahun Lalu	5.500.359	4.554.680
b. Tahun Berjalan	958.504	945.679
Total Ekuitas	7.658.863	6.700.359

Laporan Kualitas Aset Produktif

Keterangan	Nominal Dalam Satuan Rupiah					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
Surat Berharga						
Penempatan pada bank lain	12.024.482		0		0	12.024.482
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank – pihak terkait	82.756	0	0	0	0	82.756
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait	20.028.818	5.772.590	95.000	664.616	2.595.224	29.156.248
Penyertaan Modal						
Jumlah Aset Produktif	32.136.056	5.772.590	95.000	664.616	2.595.224	41.263.486
Rasio – rasio (%)						
a. KPMM	43,15					
b. Rasio Cadangan terhadap PPKA	100,00					
c. NPL (neto)	11,10					
d. NPL (gross)	11,47					
e. ROA	2,68					
f. BOPO	85,98					
g. NIM	10,26					
h. LDR	88,85					
i. Cash Ratio	13,60					

Simpanan Aman Dijamin LPS

PT BPR ARTHA SUMBER ARUM
Berizin dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan
serta merupakan Peserta Penjaminan LPS

Laporan Laba Rugi

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	Des 2024	Des 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual	5.877.495	5.230.859
b. Provisi Kredit	403.156	414.427
c. Biaya Transaksi -/-	0	0
Jumlah Pendapatan Bunga	6.280.651	5.645.287
Pendapatan Lainnya	626.622	668.367
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	6.907.273	6.313.654
Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual	2.221.017	2.036.385
b. Biaya Transaksi	0	0
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
Beban Kerugian Penurunan Nilai	486.994	436.804
Beban Pemasaran	66.987	46.437
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
Beban Administrasi dan Umum	3.109.494	2.813.188
Beban Lainnya	54.612	41.585
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	5.939.104	5.374.399
LABA (RUGI) OPERASIONAL	968.169	939.255
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	202.439	181.653
Beban Non Operasional		
Kerugian Penjualan/Kehilangan	0	0
Lainnya	40.863	23.366
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	161.576	158.287
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.129.745	1.097.542
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	171.241	151.863
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN		
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	958.504	945.679
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	0	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	958.504	945.679

Laporan Komitmen Kontijensi

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	Des 2024	Des 2023
TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen lainnya	0	0
KEWAJIBAN KOMITMEN	210.000	321.433
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	210.000	321.433
b. Penerusan kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
TAGIHAN KONTINJENSI	1.162.436	1.081.566
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian	662.432	581.562
b. Aset produktif yang dihapus buku	500.004	500.004
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
KEWAJIBAN KONTINJENSI	0	0
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA	0	0

Laporan Informasi Lainnya

Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak)	Ultimate Shareholders
DIREKSI	1. IR.ARIEF NURSANTO (33.90%)	Ya	1. IR. ARIEF NURSANTO
1. DRA.RETNO SAWITRI	2. RAHMANTO, SE,MM (21.90%)	Tidak	
2. H MUHAMMAD FIRDAUS ABDULLAH, SE	3. SRIYATI DJENAL ACHMAD (13.40%)	Tidak	
DEWAN KOMISARIS	4. DR ADHANI JURIANTI (10.80%)	Tidak	
1. DRA.ENDANG RAHAYU	5. NURHIDAYATI (10.80%)	Tidak	
2. IR.ARIEF NURSANTO	6. RETNO WIDHYAKSARI (9.20%)	Tidak	

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: INDARTO DAN YUDHIKA
Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: M. YUDHIKA ELRIFI, M.SC, AK, CA, CPA"

1. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp 10M wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp 10M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau diauditoleh Akuntan Publik.
3. Informasi keuangan di atas disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR.
4. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR.
5. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR.
6. Perhitungan rasio keuangan antara lain ROA, BOPO, CR, dan LDR dilakukan sesuai dengan ketentuan terkini dan berlaku sejak posisi laporan bulan Desember 2023.

Yogyakarta, 21 April 2025

Dra.RETNO SAWITRI
DIREKTUR UTAMA

H.MUHAMMAD FIRDAUS ABDULLAH, SE
DIREKTUR